

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebuah negara sudah barang tentu memiliki tujuan untuk mensejahterahkan dan memberdayakan rakyatnya agar dapat memiliki hidup yang layak, namun terkadang dalam kenyataannya usaha pemerintah tersebut tidak didukung dengan kebijakan yang dapat mensejahterahkan rakyatnya bahkan terkadang terkesan bahwa pemerintah melakukan pembangunan secara terpusat sehingga pendapatan masyarakat pun menjadi tidak merata dan masalah kemiskinan seakan terlalu sulit untuk diatasi. Kemiskinan juga merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang, yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia, terutama yang berada di daerah pedesaan (masyarakat petani).<sup>1</sup> Secara ekonomi, Schiller menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas<sup>2</sup>, dan dengan nada yang sama Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Puji Hadiyanti, Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 2, Nomor 1, Juni 2006: 33-46, hlm. 33.

<sup>2</sup> Schiller dalam Sutrisno R, Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan, Philosophy Press bekerja sama Fakultas filsafat UGM, Yogyakarta, 2001, hlm. 40.

<sup>3</sup> Salim dalam Andre Bayo Ala, Kemiskinan dan Strategi memerangi Kemiskinan. Liberti Yogyakarta, Yogyakarta, 1996, hlm. 92.

Jika melihat pendapat ahli di atas mengenai kemiskinan maka saat ini dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang mengalami masalah yang cukup besar di berbagai bidang terkait kemiskinan akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, dan dampak dari berbagai kebijakan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya penduduk miskin di Indonesia dan permasalahan kemiskinan yang seakan tak pernah dapat terselesaikan dan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia menjadi sebuah negara merdeka.

Kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena pedesaan, dan masyarakat petani merupakan jumlah terbanyak dari kelompok masyarakat miskin. Maka saat ini upaya dalam menangani kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusianya melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya dapat dilakukan oleh banyak pihak yaitu pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, aktor-aktor masyarakat sipil, atau organisasi masyarakat lokal sendiri. Melihat kemiskinan merupakan fenomena pedesaan maka bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan menghidupkan kembali kelembagaan pertanian.

Kelembagaan pertanian menjadi bagian pranata sosial yang cukup memfasilitasi interaksi sosial dalam sebuah komunitas. Kelembagaan petani ini juga memiliki titik strategis (*entry point*) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan, maka dari itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan atau diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani).

Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum seperti yang diharapkan.<sup>4</sup>

Kemiskinan juga merupakan masalah yang harus diatasi oleh pemerintah di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di tahun 2006 dan mengalami penurunan di tiap tahunnya kecuali di tahun 2010 mengalami peningkatan akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2009, dan peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi bukan hanya di Kabupaten Padang Pariaman saja tetapi juga di sebagian besar Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat Tahun 2006 - 2012**

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kep. Mentawai	11.60	10.00	14.70	13.23	15.10	14.56	13.10
2.	Pesisir Selatan	63.30	54.60	47.30	44.26	43.90	42.42	38.10
3.	Kab. Solok	62.30	58.50	45.00	40.81	41.00	39.52	35.60
4.	Sijunjung	30.70	28.80	21.90	18.95	21.10	20.34	18.30
5.	Tanah Datar	25.40	24.60	23.80	21.78	23.30	22.56	20.40
6.	Padang Pariaman	66.50	62.50	51.50	45.15	46.30	44.63	40.20
7.	Agam	59.40	51.10	45.30	39.68	44.90	43.28	39.00
8.	Lima Puluh Kota	52.90	46.10	34.40	31.12	36.50	35.19	31.70
9.	Pasaman	45.60	42.80	35.00	30.46	27.80	26.80	24.10
10.	Solok Selatan	22.70	21.30	16.70	14.58	16.10	15.52	14.00
11.	Dharmasraya	25.40	23.80	21.40	19.87	20.30	19.57	17.70
12.	Pasaman Barat	45.50	42.70	34.40	30.38	35.10	33.84	30.40
13.	Padang	42.10	39.50	51.70	46.81	52.70	50.90	45.70
14.	Kota Solok	2.70	2.50	4.00	3.76	4.20	4.05	3.60

<sup>4</sup> K. Suradisastira, Revitalisasi Kelembagaan untuk Mempercepat Pembangunan Sektor Pertanian dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian 4(2), 2011: 118-136.

15.	Sawahlunto	1.50	1.10	1.00	1.23	1.40	1.35	1.30
16.	Padang Panjang	2.50	2.60	4.20	4.01	3.60	3.47	3.20
17.	Bukittinggi	5.30	5.20	7.20	6.24	7.60	7.33	6.60
18.	Payakumbuh	8.20	7.70	10.90	10.13	12.40	11.95	10.80
19.	Pariaman	5.50	3.90	3.50	3.62	4.70	4.53	4.10

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012

Di Sumatera Barat bentuk kelembagaan pertanian sedang maraknya digerakkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah kelembagaan pertanian pada tanaman kakao karena pada dasarnya kakao merupakan salah satu komoditi perkebunan andalan Sumatera Barat yang juga berperan penting sebagai pendapatan daerah, penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi petani. Tanaman kakao merupakan salah satu komoditas yang cukup strategis di Provinsi Sumatera Barat. Pencanaan program revitalisasi tersebut diikuti dengan perencanaan rencana pengembangan areal perkebunan kakao Sumatera Barat hingga mencapai 108.098 ha pada tahun 2010.<sup>5</sup>

Pada tahun 2006, Sumatera Barat dicanangkan menjadi sentra kakao di wilayah Indonesia bagian barat oleh Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu M. Jusuf Kalla. Pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pengembangan kakao menjadi program utama yang dilakukan selama dua periode yaitu tahun 2006-2010 dan pada tahun 2010-2015.<sup>6</sup> Sebagai salah satu sentra perkebunan kakao di Kawasan Barat Indonesia, Sumatera Barat diharapkan dapat berperan sebagai penyanggah tajamnya penurunan produksi kakao

<sup>5</sup> Sabarman Damanik dan Herman, Prospek dan Strategi Pengembangan Kakao Berkelanjutan di Sumatera Barat, Perspektif, Volume 9, No. 2/ Desember 2010: 94-105, hlm. 96.

<sup>6</sup> Yusniar dalam Buletin Organisasi dan Aparatur: Membangun Kesejahteraan Petani Lewat Nagari Model Kakao (NMK), Edisi 44 VII 2013, hlm. 12.

di sentra-sentra produksi Wilayah Timur Indonesia maka pada tahun 2006 pemerintah pusat telah mencanangkan program revitalisasi perkebunan kakao di Sumatera Barat. Untuk merealisasikan hal tersebut diluncurkan program pengembangan kakao 2006-2010 dengan target perluasan 83.056 ha dari 25.042 ha areal yang sudah ada.<sup>7</sup>

Dengan memperhatikan perkembangan areal perkebunan kakao Sumatera Barat beberapa tahun terakhir maka tidak mustahil Sumatera Barat akan menjadi produsen utama kakao di Wilayah Barat Indonesia.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Areal Perkebunan Kakao Sumatera Barat Tahun 2006-2008**

No.	Kabupaten/ Kota	Areal/ (Ha)			
		2005	2006	2007	2008
1.	Agam	1.073	3.152	3.965	4.682
2.	Pasaman	9.700	15.039	15.639	15.831
3.	Lima Puluh Kota	902	1.035	2.295	2.980
4.	Tanah Datar	300	312	1.052	1.540
5.	Padang Pariaman	3.326	4.641	6.001	15.669
6.	Solok	300	1.073	2.573	2.573
7.	Pesisir Selatan	508	521	1.221	1.663
8.	Sijunjung	650	658	937	1.097
9.	Pasaman Barat	6.000	7.204	8.387	9.754
10.	Dharmasraya	96	303	827	1.202
11.	Kep. Mentawai	259	598	918	968
12.	Solok Selatan	15	158	349	601
13.	Kota Sawahlunto	1.200	1.190	1.820	2.412
14.	Kota Padang	214	152	268	375
15.	Kota Solok	-	27	34	99
16.	Kota Bukittinggi	-	6	13	13
17.	Kota Pariaman	24	99	106	126
18.	Kota Payakumbuh	175	192	222	287
19.	Kota Padang Panjang	-	-	-	-
	Jumlah	25.042	36.360	46.627	61.872
	Jumlah Petani (KK)				59.691

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, 2009.

<sup>7</sup>Sabarman Damanik dan Herman, op.cit., hlm. 96 dan 97.

Di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, terdapat sepuluh prioritas pembangunan sebagai penjabaran atas agenda pembangunan daerah yang merupakan turunan dari visi misi kepala daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu: 1) pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat, 2) pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, 3) peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, 4) peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 5) pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan, 6) pengembangan industri olahan, UMKMK, perdagangan dan iklim investasi, 7) pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, 8) percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal, 9) pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat, 10) penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tersebut pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mengadakan berbagai macam program untuk mengembangkan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan, khususnya untuk tanaman kakao dimana nantinya selain berhasil merevitalisasi perkebunan kakao dan perluasan lahan kakao di Sumatera Barat diharapkan juga akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Untuk arah pengembangan kawasan komoditi unggulan perkebunan di Sumatera Barat sendiri terdiri dari berbagai komoditi seperti kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, kopi, gambir, *cassia vera*, nilam, dan jarak pagar. Namun seperti yang telah banyak

---

<sup>8</sup>RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, hlm. 187.

dijelaskan di atas bahwa untuk merealisasikan pencaangan Sumatera Barat sebagai sentra kakao di Indonesia bagian barat maka arahan pengembangan komoditi unggulan kakao dilakukan di seluruh wilayah Sumatera Barat yaitu Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok.<sup>9</sup>

**Tabel 1.3**  
**Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perkebunan**

No	Komoditi Perkebunan	Lokasi Kawasan Pengembangan Pada Kabupaten/Kota
1	Kelapa Sawit	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung , Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Kepulauan Mentawai
2	Karet	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung , Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman
3	Kelapa Dalam	Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Solok, Kab. Kepulauan Mentawai
4	Kakao	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok
5	Kopi	Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pasaman
6	Gambir	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung
7	Cassiavera	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 180.

		Pasaman, Kab. Solok
8	Nilam	Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sijunjung, Kab. Solok
9	Jarak Pagar	Kab. Pasaman, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan

Sumber Data: RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

Untuk arahan pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan perkebunan kakao sendiri berada pada Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman yang diikuti dengan daerah penyangga pengembangan kawasan komoditi kakao yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.<sup>10</sup>

**Tabel 1.4**  
**Arahan Pengembangan Kawasan Sentra Komoditi Unggulan Perkebunan**

No	Komoditi Perkebunan	Lokasi Sentra	Penyangga
1	Kelapa Sawit	Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan
2	Karet	Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman
3	Kelapa Dalam	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai
4	Kakao	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman	Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Kep. Mentawai
5	Kopi	Kab. Tanah Datar, Kab. Solok	Kab. Agam
6	Gambir	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Agam

<sup>10</sup> Ibid.



7	<i>Cassiavera</i>	Kab. Tanah Datar, Kab. Solok Selatan	Kab. Solok
8	Nilam	Kab. Pasaman Barat, Kab. Mentawai	Kab. Solok, Kab, Sijunjung

Sumber Data: RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

Kabupaten Padang Pariaman menjadi lokasi arahan pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan perkebunan kakao berdasarkan kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/ Kota yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015. Kabupaten Padang Pariaman bukan satu-satunya lokasi arahan pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan perkebunan kakao selama kurun waktu 2010-2015, Kabupaten Pasaman juga menjadi lokasi arahan pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan perkebunan kakao dalam kurun waktu yang sama.

Alasan peneliti memilih Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokus penelitian adalah karena beberapa hal di antaranya yaitu Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan salah satu lokasi arahan pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan perkebunan kakao itu sendiri dan melihat perbandingan di kedua lokasi arahan pengembangan sentra kakao tersebut seperti yang terlihat pada tabel 1.4:

**Tabel 1.5**  
**Perbandingan Areal Perkebunan Kakao Padang Pariaman dan Pasaman Tahun 2006-2008**

No.	Kabupaten/ Kota	Areal/ (Ha)			
		2005	2006	2007	2008
1.	Pasaman	9.700	15.039	15.639	15.831
2.	Padang Pariaman	3.326	4.641	6.001	15.669
	Jumlah	13.026	19.680	21.640	31.500

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, 2009.

Luas areal perkebunan kakao yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2005 lebih kecil dibandingkan dengan luas areal yang dimiliki Kabupaten Pasaman yang ditunjukkan dengan angka 3.326 Ha di Kabupaten Padang Pariaman dan 9.700 Ha di Kabupaten Pasaman, tetapi dalam perkembangannya areal perkebunan kakao di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan laju yang signifikan dibandingkan dengan Kabupaten Pasaman yang dapat ditunjukkan dengan angka 15.669 Ha di Kabupaten Padang Pariaman dan 15.831 Ha di Kabupaten Pasaman di tahun 2008, yang membuat peneliti menarik kesimpulan bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki perkembangan yang cukup baik dan memiliki peluang yang lebih besar dalam upaya melakukan pengembangan target perluasan lahan tanaman kakao.

Perkembangan pertanaman kakao di Kabupaten Padang Pariaman dimulai pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2002 oleh Dinas Perkebunan Provinsi yang didanai dari APBN dan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2005 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang didanai dari APBD. Kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 oleh Dinas Perkebunan Provinsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana dari APBD yang berupa bantuan bibit. Pada tahun 2010 mendapatkan pengembangan lanjutan yang berasal dari Disbun Provinsi, LSM, dan bibit kakao dari inang (varietas

unggul) berupa bantuan bibit yang ikut mengembangkan pertanaman kakao di Kabupaten Padang Pariaman.<sup>11</sup>

Sejalan dengan program-program yang telah di jelaskan di atas, upaya lainnya yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam merevitalisasi perkebunan kakao dan mengembangkan target perluasan areal kakao, juga untuk menghasilkan produksi kakao yang baik adalah dengan mengadakan program Nagari Model Kakao yang di dalamnya terdapat sekolah lapang tentang budidaya kakao (SL kakao) di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman untuk mencoba melihat pada kawasan sentra komoditi unggulan perkebunan Kakao di Sumatera Barat dengan memberikan materi berupa pembelajaran dari kondisi kakao di lapangan, memeriksa dan mengamati dan menyimpulkan setiap kondisi yang terjadi pada tanaman.<sup>12</sup>

Nagari Model Kakao (NMK) merupakan program pengembangan desa atau nagari mandiri (*community development program*) kakao, yang dirancang secara komprehensif dan terintegrasi sesuai dinamika permasalahan yang dihadapi, melibatkan berbagai pihak melalui dukungan dan fasilitas banyak pihak, sehingga melalui NMK diharapkan komoditas kakao bisa menjadi motor penggerak ekonomi nagari dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera, dan juga diharapkan dapat

---

<sup>11</sup> Renstra Dipertahorthutbun Tahun 2011-2015.

<sup>12</sup>Redaksi Pos Metro Padang. 2013, 05 Mei. Disbun Bekali Petani Kakao dengan Gunting. Diakses di [http://posmetropadang.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=5397&Itemid=32](http://posmetropadang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5397&Itemid=32) pada tanggal 03 September 2013 pukul 23.15 WIB.

berimbas dan berdampak secara luas pada nagari-nagari dan kecamatan di sekitarnya.<sup>13</sup>

Program Nagari Model Kakao ini juga tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti peserta yang tidak dapat hadir pada saat sekolah lapang dilaksanakan dan biasanya digantikan sementara oleh anggota dari kelompok tani yang sama dengan peserta tersebut, juga adanya peserta Sekolah Lapang Kakao yang berhenti di tengah-tengah perjalanan karena mengaku tidak sanggup mengikuti Sekolah Lapang Kakao tersebut.<sup>14</sup>

Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam Nagari Model Kakao pada tahun 2011 itu sendiri yaitu pengadaan komputer *notebook* dan *in focus*; pertemuan koordinasi, pengadaan alat pertanian; pengadaan poster pemangkasan tanaman kakao; pengadaan pondok pertemuan; sekolah lapang kakao; penyusunan rancang bangun nagari model kakao; peliputan kegiatan oleh media massa; dan survey, pembinaan, koordinasi, serta kunjungan lapangan.<sup>15</sup>

Kesembilan kegiatan yang dilaksanakan di atas merupakan suatu kesatuan yang dilaksanakan dalam program Nagari Model Kakao, setelah semua kegiatan tersebut dilakukan diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mendukung kesembilan kegiatan yang telah dilakukan tersebut ada bentuk

---

<sup>13</sup>Yusniar, op.cit., hlm. 13.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Muslim, Peserta Sekolah Lapang dari Kelompok Tani Semoga Jaya.

<sup>15</sup> Laporan Kegiatan Pengembangan Nagari Model Pembangunan Kakao, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, 2011.

kelanjutan yang dilakukan yaitu seperti yang dijelaskan oleh Muslim, salah satu peserta Sekolah Lapang Kakao dari Kelompok Tani Semoga Jaya bahwa:

*Adanya penyaluran informasi dan pengetahuan yang didapat peserta selama mengikuti pelatihan/ penyuluhan Sekolah Lapang Kakao kepada masing-masing anggota kelompok taninya pada saat pertemuan rutin, biasanya dilakukan dengan praktik kebun langsung seperti tentang sanitasi, sambung samping dan sambung pucuk, pemupukan, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>*

Seperti yang telah dikatakan narasumber di atas bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan yang dilakukan dalam Nagari Model Kakao, seperti salah satunya Sekolah Lapang Kakao adalah dengan mengadakan pertemuan rutin pada masing-masing kelompok tani yang ditujukan untuk membagikan ilmu yang telah diterima oleh perwakilan dalam kelompok tani kepada anggota masing-masing kelompok tani saat mengikuti Sekolah Lapang Kakao sehingga dengan demikian setiap anggota dalam kelompok tani tersebut juga dapat mengerti dan memahami serta dapat mempraktikkannya di kebun secara langsung.

Bentuk pendampingan yang dilakukan setelah Sekolah Lapang Kakao selesai adalah seperti yang dikatakan oleh Zulkifli, Kepala UPTD Kecamatan Sungai Geringging bahwa:

*Bentuk pendampingan biasanya dengan memberikan penyuluhan yang didatangkan dari BPTP Sungai Geringging yang dilakukan sekali dalam sebulan, UPTD juga melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok tani yang ada tetapi kunjungan ini sifatnya tidak terjadwal, tergantung dengan tugas yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat kepada kelompok tani tertentu terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan kakao, dan juga bentuk kelanjutan yang*

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muslim, Peserta Sekolah Lapang Kakao dari Kelompok Tani Semoga Jaya, Padang, 12 Februari 2014.

*dilakukan yaitu pelatihan ketua kelompok tani dengan membawa studi banding ke daerah-daerah lain yang memiliki perkebunan kakao dengan kualitas baik atau ke salah satu pabrik kakao yang memiliki kualitas produksi baik. Bentuk kelanjutan lain yang diberikan dalam pengadaan fasilitas-fasilitas tertentu sesuai dengan permohonan bantuan dari kelompok tani seperti bantuan bibit, pupuk, senapan angin, kotak fermentasi, becak motor, para-para (tempat penjemuran kakao), dan lain-lain yang berkaitan dengan kakao.<sup>17</sup>*

Dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD Sungai Geringging tersebut dapat diketahui bahwa adanya bentuk kelanjutan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu seperti yang telah dikatakan di atas adalah dengan memberikan penyuluhan dari BPTP Sungai Geringging dalam waktu tertentu, dan adanya kunjungan oleh UPTD terkait untuk melakukan pengawasan dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan kakao. Bentuk kelanjutan lainnya adalah dengan membawa ketua kelompok tani studi banding ke daerah-daerah lain yang memiliki perkebunan kakao dengan kualitas baik atau ke salah satu pabrik kakao yang memiliki kualitas produksi baik, serta dengan pengadaan fasilitas berupa alat-alat pertanian yang dapat menunjang dalam pengelolaan dan pemeliharaan kebun kakao yang dimiliki.

Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan program Nagari Model Kakao adalah seperti dalam pertemuan koordinasi yang melibatkan dinas atau instansi terkait di Provinsi dan di Kabupaten serta dari perguruan tinggi yang hanya dapat dilakukan tiga kali dari rencana awal sebanyak empat kali pertemuan koordinasi. Kemudian dalam pengadaan alat-alat pertanian yang diberikan kepada kelompok-kelompok tani secara teknis masih belum begitu baik karena pendistribusian yang belum ditetapkan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Zulkifli, Kepala UPTD Sungai Geringging Dipertahorthutbun Kabupaten Padang Pariaman, Padang, 12 Februari 2014.

secara jelas untuk kelompok-kelompok tani yang ada, begitu juga halnya dengan pengadaan poster pemangkasan tanaman kakao yang digunakan sebagai sarana penyuluhan tentang teknologi pemangkasan yang dianjurkan. Dalam hal pengadaan pondok pertemuan yang belum memberikan fasilitas kenyamanan dan kapasitas daya tampungnya yang tidak terlalu banyak.

Hal lain juga ditemukan pada pelaksanaan Nagari Model Kakao adalah dalam Sekolah Lapang Kakao yang juga kemudian menjadi perhatian bagi peneliti sebagai salah satu yang akan dilakukan dalam mengevaluasi dampak program ini adalah seperti yang dikatakan oleh Muslim, salah satu peserta Sekolah Lapang Kakao dari Kelompok Tani Semoga Jaya bahwa:

*Ketiadaan pupuk untuk melakukan perawatan kebun kakao berpengaruh terhadap rendahnya hasil produksi yang didapat, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan petani. Masalah ini sebenarnya sudah beberapa kali diusahakan meminta bantuan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, tapi distribusi pupuk ini tidak merata didapat seluruh kelompok tani termasuk anggota di dalamnya, ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kami dalam kelompok tani. Permasalahan pemberian becak motor pada kelompok tani sebagai salah satu bentuk kelanjutan program ini juga jadi hal yang dipertanyakan oleh beberapa anggota dalam kelompok tani, karena pada kenyataannya bagi yang ingin menggunakan becak motor harus menyewa pada suatu kelompok tani dan membayar sejumlah uang tertentu.<sup>18</sup>*

Dalam melakukan evaluasi dampak program ada beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap dampak yang dihasilkan dari program tersebut yang dalam hal ini peneliti menggunakan teori evaluasi dampak dengan jenis

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sukirman, Peserta Sekolah Lapang Kakao dari Kelompok Tani Saiyo Sakato, Padang, 13 Februari 2014.

penelitian *single program after only*. Menurut Finsterbusch dan Motz ada beberapa indikator dalam output ekonomi yang digunakan sebagai indikator perhitungan dampak, di antaranya adalah pendapatan, perumahan, serta kepuasan kerja. Untuk melihat dampak tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu peserta Sekolah Lapang Kakao yaitu Muslim yang berasal dari Kelompok Tani Semoga Jaya, yang mengatakan bahwa:

*Pendapatan memang lebih meningkat setelah dilakukannya Sekolah Lapang Kakao, tapi untuk perubahan kondisi perumahan belum ada karena pendapatan saya belum terlalu besar untuk merubah kondisi rumah. Saya merasa cukup puas dengan hasil pengelolaan kebun kakao yang saya lakukan karena sudah mengetahui cara mengelola kebun yang baik dan benar, dan saya sudah bisa melakukan pengolahan biji kakao dengan fermentasi tapi untuk sambung samping dan sambung pucuk belum ada yang berhasil dan belum ada hasilnya salah satunya karena faktor keterbatasan entress (batang dari tanaman unggul) yang saya miliki dan juga teknik yang belum begitu baik.<sup>19</sup>*

Fenomena lain yang terjadi juga peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu peserta Sekolah Lapang Kakao yaitu Sukirman yang berasal dari Kelompok Tani Saiyo Sakato, yang mengatakan bahwa:

*Ada perubahan pendapatan setelah mengikuti penyuluhan Sekolah Lapang Kakao karena pengetahuan saya bertambah dalam mengelola kebun kakao secara baik dan benar, tapi pendapatan saya belum bisa merubah kondisi rumah karena pendapatan saya belum begitu besar. Untuk kepuasan kerja sendiri saya merasakan perubahan kearah yang lebih baik karena pelatihan atau penyuluhan Sekolah Lapang Kakao yang saya ikuti. Sebenarnya hasil yang baik tergantung dengan pupuk yang dimiliki, kalau pupuk yang saya punya cukup untuk memelihara tanaman kakao maka hasil yang dapatkanpun akan baik, tapi kan cukup sulit untuk beli pupuk yang dibutuhkan, sedangkan bantuan*

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Muslim, Peserta Sekolah Lapang dari Kelompok Tani Semoga Jaya.



*pupuk yang selama ini diberikan oleh Dinas Perkebunan Kakao saya rasa belum merata untuk seluruh anggota kelompok tani yang ada.*<sup>20</sup>

Berdasarkan masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang dipaparkan di atas peneliti merasa perlu mengevaluasi program untuk melihat dampak dari program yang dilakukan dengan melihat kondisi setelah program (*single program after only*) dijalankan, apakah memberikan dampak yang positif atau dampak negatif, apakah telah sesuai dengan tujuan untuk merevitalisasi perkebunan kakao dan mewujudkan masyarakat sejahtera sehingga dapat diketahui keefektivitasan atau keberhasilan maupun ketidakberhasilan dari program itu sendiri. Evaluasi terhadap kesuksesan program sebenarnya juga perlu dilakukan untuk melihat capaian yang telah dihasilkan selama program Nagari Model Kakao dilakukan, dan hal ini bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi dampak kebijakan atau program. Hal inilah yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program dalam melihat dampak yang telah dihasilkan yang disesuaikan dengan tujuan awal program tersebut.

Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari program Nagari Model Kakao dengan cara menggambarkan dampak yang dihasilkan, kemudian berdasarkan hasil tersebut akan dinilai apakah program tersebut berhasil atau tidak berdasarkan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan penilaian mengenai keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai dampak yang telah direncanakan. Program Nagari Model Kakao merupakan program Dinas

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sukirman, Peserta Sekolah Lapang Kakao dari Kelompok Tani Saiyo Sakato, Padang, 13 Februari 2014.

Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan mengembangkan tanaman kakao dan membangun kelembagaan pertanian yang akan membina petani kakao untuk melakukan budidaya kakao secara benar melalui Sekolah Lapang Kakao yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk menyejahterakan petani, namun bagaimana program tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak belum dapat diketahui apabila belum dilakukan evaluasi. Atas pertimbangan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan melihat dampak dari sebuah program Sekolah Lapang dengan judul penelitian yaitu: **Evaluasi Program Nagari Model Kakao di Kabupaten Padang Pariaman?**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Masalah kemiskinan di Indonesia sebagian besar ditimbulkan dari sektor pertanian dengan segala persoalan yang terjadi pada petani baik itu perannya yang hanya sebagai petani garapan atau karena dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan petani dalam mengolah hasil produksi tanaman, teknik pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit, dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang kemudian menjadi polemik yang tak terselesaikan sehingga angka kemiskinan setiap tahunnya tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Penelitian ini membahas tentang program Nagari Model Kakao dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat kepada kelompok tani yang berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman, dimana yang menjadi nagari model di kabupaten ini adalah Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging. Penelitian ini juga

dimaksudkan agar para petani yang tergabung dalam kelompok tani diberdayakan bukan hanya dalam hal materi namun juga dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan akhir yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu cara menanggulangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah **bagaimanakah dampak program Nagari Model Kakao di Kabupaten Padang Pariaman?**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan program Nagari Model Kakao di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mengevaluasi program Nagari Model Kakao di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Menilai dampak dari program Nagari Model Kakao di Kabupaten Padang Pariaman.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Untuk menjadi bahan penelitian-penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai Sekolah Lapang Kakao ataupun penelitian-

penelitian yang sejenisnya dalam upaya menanggulangi tingkat kemiskinan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak lain baik mahasiswa, peneliti, maupun pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kepada kelompok tani yang memiliki pengaruh besar terhadap perkenomian Indonesia.